

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Komitmen Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Pengertian Komitmen Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Zurnali C (2010 : 127) “Komitmen organisasi adalah sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi tau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen yakni komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif”. Sedangkan, Menurut Wibowo (2017 : 188) mengatakan “Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi”. Carsten dan Spector dalam Adifitya (2014 : 837) mengatakan “Bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan selalu meningkatkan kinerjanya”. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesaikan bahwa Komitmen pada organisasi/komitmen organisasi adalah orientasi karyawan terhadap organisasi dalam hal kesetiaan, dan keterlibatan dalam organisasi. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, Kemauan untuk mengerahkan usaha yang kuat atas nama organisasi, dan keyakinan yang dalam penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

2.1.1.2 Manfaat Komitmen Organisasi

Menurut Juniarari (2011) mengemukakan bahwa manfaat dari komitmen organisasi yaitu di antaranya (1) Karyawan yang serius dalam menunjukkan komitmen tinggi kepada organisasi memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk menunjukkan tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam sebuah organisasi, (2) Memiliki kemauan yang kuat untuk tetap bekerja di organisasi yang sekarang dan

selalu memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan, (3) Dengan kesungguhan terlibat dengan pekerjaan, karena pekerjaan tersebut ialah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

2.1.1.3 Dimensi Komitmen Organisasi

Menurut Wibowo (2017 : 215) dimensi komitmen organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Komitmen efektif (*Affectif commitment*)
Komitmen afektif, yaitu sebuah keterikatan emosional terhadap organisasi dan kepercayaan akan nilai-nilainya. Indikator yang digunakan dalam dimensi komitmen afektif adalah keterikatan emosi terhadap organisasi dan setuju dengan tujuan dan nilai organisasi.
2. Komitmen berkelanjutan (*Continuance commitment*)
Komitmen berkelanjutan, yaitu sebuah keinginan untuk tetap menjadi anggota sebuah organisasi. Indikator yang digunakan dalam dimensi komitmen berkelanjutan adalah kesadaran akan biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasi.
3. Komitmen normatif (*Normative commitment*)
Komitmen normatif, yaitu kewajiban untuk tetap didalam organisasi untuk alasan moral atau etika. indikator yang digunakan dalam dimensi komitmen normatif adalah merasa berkewajiban melanjutkan pekerjaan.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 (10) tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, Keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Sedarmayanti (2018 : 226), Kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik, Sedangkan menurut Martin (2017 : 92), "Kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang membuatnya dapat memperlihatkan kinerja superior dan efektif".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesis bahwa kompetensi merupakan suatu keahlian atau kepandaian seseorang dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

2.1.2.2 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. Standar kompetensi mencakup tiga hal yaitu :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
 Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan atau organisasi.
2. Keterampilan (*Skill*)
 Keterampilan (*Skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, Misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dari memotivasi orang lain, Baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi.
3. Sikap (*Attitude*)
 Sikap (*Attitude*) merupakan pola tingkah seseorang pegawai dalam peran melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, Maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.3.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi (Undang-Undang RI Tentang ITE, 2008 : 2). Teknologi yang digunakan dalam teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah untuk suatu organisasi (Hastha Dewa Putranta, 2004 : 24). Sedangkan menurut Aji Supriyanto, (2005 : 243) informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Menurut Mulyanto (2009 : 43) teknologi informasi merupakan perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi menurut Lantip (2011:1), merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai hal seperti sistem komputer *hardware* dan *software* , *Local area network* (LAN), *Metropolitan area network* (MAN), *Wide area network* (MAN). Menurut Widuri (2010 : 27) pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi informasi bersangkutan oleh pengguna melalui sistem informasi berbasis komputer dalam rangka menyelesaikan berbagai tugas dan masalah yang dihadapi pengguna dalam menjalankan pekerjaannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, baik secara individual, kelompok maupun organisasi, dengan memfokuskan pada level individu, khususnya *end user computing*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesis bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi dan teknologi informasi yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi.

2.1.3.2 Manfaat Teknologi Informasi

Menurut Hamzah (2009 : 29) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini

2.1.3.3 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wardani dan Ika (2017) menyatakan bahwa indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Proses kerja secara elektronik, dimaksud untuk mengetahui apakah instansi memiliki komputer yang cukup dan apakah proses kerja sudah dilakukan secara elektronik.
2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan, dimaksud untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan data oleh instansi.
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet, dimaksud untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Informasi dengan memanfaatkan internet.

4. Sistem Manajemen, dimaksud untuk mengetahui informasi yang dihasilkan memiliki integrasi.
5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer, dimaksud untuk mengetahui jadwal pemeliharaan barang elektronik, perbaikan pada peralatan yang rusak dan penggunaan antivirus pada komputer

2.1.4 Peran Auditor Internal

2.1.4.1 Pengertian Peran Auditor Internal

Menurut Hery (2017 : 28), audit internal adalah suatu fungsi penelitian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi ataupun perusahaan. Peran internal audit atau inspektorat sebagai aparat pengawas internal pada pemerintah daerah melaksanakan fungsi kegiatan audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran perbaikannya (AAIPI, 2013).

Sedangkan menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI), audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian resiko, pengendalian dan proses *governance*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesis bahwa Peran Auditor Internal adalah suatu proses pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara atau organisasi.

2.1.4.2 Tanggung Jawab Pelaksanaan Peran Auditor Internal

Tanggung jawab pelaksanaan Peran Auditor Internal terletak pada manajemen. Dalam organisasi pemerintahan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut (AAIPI,2013) “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya”.Berdasarkan pengertian tersebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
3. Inspektorat Provinsi atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan inten di tingkat Pemerintah Provinsi, dan
4. Inspektorat Kabupaten/Kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern di tingkat Kabupaten/Kota.

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Inspektorat Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

2.1.4.3 Proses Auditor Internal

Menurut Tunggal (2012), terdapat lima proses atau tahapan audit internal, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan audit

Alam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Berdasarkan poin penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf.
2. Survei pendahuluan

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan menggunakan hasil survei secara efektif.
3. Mengaudit pekerjaan lapangan

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan

tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.

4. Temuan Audit dan Rekomendasi

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.

5. Pelaporan

Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tapi tak satupun yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini: outline report, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan final report.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Fahmi (2014:2) menyatakan “laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”, Sedangkan harahap (2013:146),”Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesis bahwa Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah bahwa tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.

2.1.5.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang sesuai dengan standar.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan secara wajar.
- b. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman serta pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5.3 Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : 26) :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1	Arvian Triantoro (Jurnal : 2014)	Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bandung	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal	Penelitian ini mengangkat variabel Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	(1)Variabel Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (2)Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (3)Variabel Komitmen Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

No	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Persamaan	Hasil
2	Fitri Mariana Tampubolon, Ahmad Basid. (Jurnal :2019)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Penelitian ini tidak mengangakat variabel Peran Auditor Internal	Penelitian ini mengangakat variabel Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Infomasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	(1)Variabel Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (2)Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (3)Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah, (4)Variabel Komitmen Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Persamaan	Hasil
3	Rivaldy Manimpurung, Lintje Kalangi, Natalia Gerungai (Jurnal : 2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal	Penelitian ini mengangkat variabel Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	(1) Variabel Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (2) Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (3) Variabel Komitmen Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

No	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Persamaan	Hasil
4	Andika Siahaan (Jurnal : 2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Peran Auditor Internal	Penelitian ini mengangkat variabel Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	(1) Variabel Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (2) Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (3) Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. (4) Variabel Komitmen Organisasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Persamaan	Hasil
5	Frasca Ardy (Jurnal: 2014)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Peran Aduitor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tegal	Penelitian ini tidak mengangkat variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaata n Teknologi Informasi,	Penelitian ini mengangkat variabel Komitmen Organisasi Perangkat Daerah,Pera b Auditor Internal dan Kulitas Laporan Keuangan	(1) Variabel Komitmen Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah, (2) Variabel Peran Auditor Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (3) Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tegal

2.3 Kerangka Pemikiran

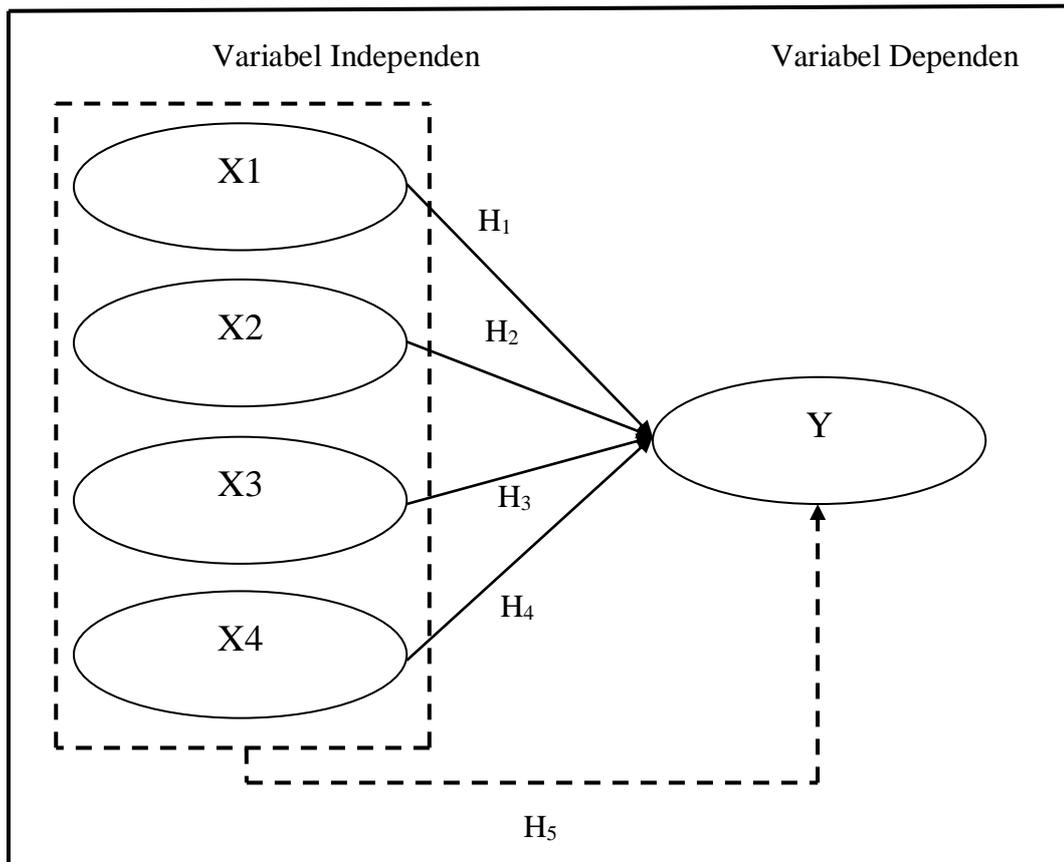
Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tinggal didalam organisasi tersebut (Wibowo, 2017). Komitmen yang semakin tinggi terhadap organisasi akan memudahkan pekerjaan yang tersulit sekalipun. Seseorang yang memiliki kemauan yang kuat dan melakukan tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan keuangan hal itu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tanpa ada komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan mengurangi kepedulian SDM untuk memberikan hasil yang terbaik terhadap tanggung jawabnya.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan SDM melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya bekal pendidikan pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Marwansyah,2016,35). Pemerintah yang memiliki SDM yang berkompeten dalam hal pembuatan laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan optimal.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dengan proses pengolahan data transaksi lebih tepat dan cepat dan menghindari kemungkinan kehilangan data laporan keuangan. Semakin bagus teknologi informasi yang digunakan tentunya kualitas laporan keuangan lebih berkualitas.

Auditor Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada organisasi tersebut. Dengan kata lain, internal audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran perbaikannya (AAIPI, 2013). Pemerintah yang memiliki auditor internal yang berkompeten dalam hal evaluasi laporan keuangan diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka akan tampak pada gambar paradigma penelitian dibawah ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Keterangan :

—————▶ : Menunjukkan secara parsial

- - - - -▶ : Menunjukkan secara simultan

X1 : Komitmen organisasi perangkat daerah

X2 : Kompetensi sumber daya manusia

X3 : Pemanfaatan teknologi informasi

X4 : Peran auditor internal

Y : Kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah

Berdasarkan gambar di atas, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:96). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Diduga ada pengaruh secara parsial Komitmen Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.
- H₂ : Diduga ada pengaruh secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.
- H₃ : Diduga ada pengaruh secara parsial Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.
- H₄ : Diduga ada pengaruh secara parsial Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.
- H₅ : Diduga ada pengaruh secara simultan Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.